

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Swedia sebagai salah satu negara di wilayah Nordik menjadi negara pertama dan sering melakukan promosi – promosi terkait dengan kesetaraan diantara negara Nordik (Sweden Goverment, 2019). Secara geografis, Swedia terletak di Eropa Utara yang merupakan salah satu kawasan negara – negara Nordik. Swedia selalu menyoroti dan mengedepankan tentang poin – poin feminisme atau kesetaraan gender, maka pada setiap kebijakan luar negeri yang diberikan Swedia mempunyai titik temu terkait pemberdayaan wanita dan anak yang ditunjukkan melalui pernyataan resmi pemerintah Swedia. Hal tersebut dibuktikan dengan, Swedia membuat Handbook Sweden’s Feminis Foreign Policy yang dikeluarkan oleh Ministry of Foreign Policy Affairs sebagai ciri khas dialog Swedia di dunia yang dicirikan oleh kesetaraan gender. Swedia juga membuat *The Swedish Foreign Policy Service Action Plan for Feminis Foreign Policy 2019-2022*. Hal tersebut memperjelas bahwa arah kebijakan luar negeri Swedia yang berfokus pada kesetaraan gender (Sweden Goverment, 2019).

Swedia dalam mengimplementasikan feminisme tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, namun juga melakukan kerjasama – kerjasama dengan negara - negara Nordik yang lain. Swedia pernah melakukan Kampanye *Midwives4all* yang digunakan untuk merespon isu Uganda terkait dengan tingginya tingkat kematian ibu yang diakibatkan oleh sedikitnya jumlah

bidan yang profesional. Kampanye Midwives4all memberikan pemahaman pada negara lain terutama Uganda bahwa adanya investasi terkait dengan kebidanan merupakan hal yang sangat penting, dimana hal tersebut merupakan langkah awal untuk mengajarkan masyarakat menghormati hak perempuan dan juga anak (Sweden Ministry for Foreign Affairs, 2015).

Swedia menggunakan *platform* media massa dan juga aktor – aktor yang dapat berpengaruh pada masyarakat. Kampanye tersebut menjadikan Swedia memiliki citra untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kesetaraan gender di Uganda bahkan dunia. Uganda merespon dengan sangat positif dengan adanya kampanye tersebut yang menganggap bahwa Swedia memiliki pengalaman yang banyak terkait dengan kesetaraan gender (Embassy of Sweden in Uganda,, t.thn.).

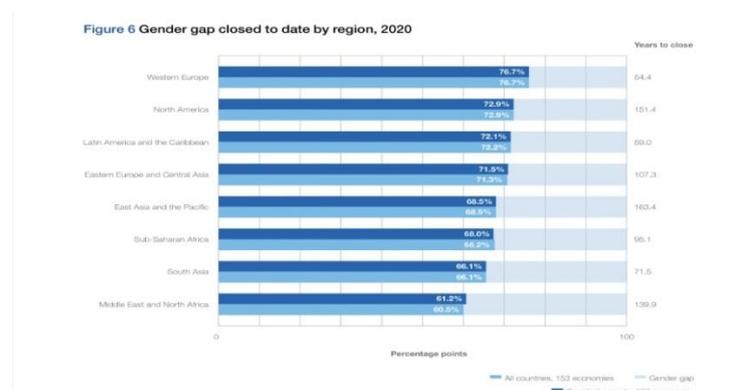
Kampanye lain untuk mempromosikan kesetaraan gender dilakukan oleh Swedia dan Denmark yang melakukan Kampanye SheDecides untuk merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu kebijakan Global Gag Rule atau aturan yang memperbolehkan atau melegalkan adanya aborsi (SheDecides.com, 2017). Swedia dan Denmark melakukan kampanye ini untuk memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Bahkan negara seperti Belgium dan Belanda untuk andil dalam melakukan

Negara - negara Nordik merupakan negara yang menempati wilayah yang secara geografis terletak di Eropa Timur dan Atlantik Timur. Negara Nordik ini terdiri dari 3 negara yang berada di semenanjung Nordik yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia dan juga ditambah dua negara Eropa yaitu Islandia dan Finlandia.

Negara – negara Nordik ini memiliki banyak kesamaan mulai dengan cara hidup, agama, sejarah, bahasa, bahkan struktur sosial. Terdapat perbedaan yaitu diantaranya model ekonomi dan sosial di masing – masing negara. Ekonomi negara – negara Nordik digolongkan sebagai negara maju dikarenakan pendapatan perkapita yang tinggi. Negara – negara Nordik pada akhirnya memiliki kemampuan untuk membentuk karakteristik khusus yaitu sebagai Welfare State atau Negara Kesejahteraan yang disebut sebagai Model Nordic State (Pedersen, 2017).

Kebijakan – kebijakan terkait dengan gender dapat dilihat sejak tahun 1970-an negara - negara Nordik telah berusaha untuk membuat kebijakan seperti sistem pensiun, cuti untuk ayah, bahkan cuti hamil untuk ibu di kebijakan domestik negara – negara Nordik. Mengacu pada Gender Equality Gap, wilayah Nordik memiliki presentase yang tinggi menurut World Economic Forum, Global Gender Gap Index, 2020. Terlihat bahwa, Eropa Barat sekali lagi menjadi wilayah dengan kesenjangan gender terkecil (76,7%), menempatkannya di atas Amerika Utara, yang telah menutup 72,9% (World Economic Forum, 2020).

Bagan 1. Presentasi tingkat gender gap berdasarkan wilayah tahun 2020



Source : World Economic Forum, Global Gender Gap Index, 2020.

Data diatas telah menunjukkan bahwa negara - negara di Eropa Barat yang merupakan wilayah negara - negara Nordik berada pada tingkat kesenjangan gender yang terkecil. Dimana terlihat Eropa Barat berada pada jumlah tertinggi diantara benua yang lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan dari masing – masing negara Eropa Barat dalam menyikapi dan mewujudkan kesetaraan gender.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis menilai bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan karena sebelumnya penulis belum melihat ada penelitian yang mendalam terkait dengan identitas nilai Nordik dengan kebijakan feminisme di Swedia.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, terkait Swedia yang berusaha untuk mengimplementasikan nilai – nilai kesetaraan untuk mencapai konsep *welfare state*. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya identitas dan nilai Nordik yang mempengaruhi, maka menimbulkan pertanyaan untuk penelitian ini yaitu : “Bagaimana karakter identitas dan nilai negara - negara Nordik menjadi *driving force* Swedia dalam membuat kebijakan luar negeri berbasis feminisme?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya identitas Swedia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana identitas negara – negara Nordik berpengaruh pada kebijakan luar negeri feminis di Swedia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dan memperkaya kajian terkait dengan keterkaitan antara identitas dan nilai negara – negara nordik dengan kebijakan luar negeri feminisme di Swedia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan untuk aktor pembuat kebijakan terakit dengan arah kebijakan luar negeri Swedia.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa identitas suatu bangsa dapat berpengaruh pada kebijakan suatu negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena sebelumnya penulis belum melihat ada penelitian yang mendalam terkait dengan identitas nilai Nordik dengan kebijakan feminisme di negara – negara Nordik. Penelitian – penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana kebijakan feminisme berkembang di negara - negara Nordik. Adanya kesamaan tujuan dan kebijakan dibidang feminisme di negara – negara Nordik juga menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam menggunakan sudut pandang identitas nilai Nordik.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Bent Greve dalam karyanya “*What Characterise the Nordic Welfare State Model*” (Greve, 2007). Dalam tulisan tersebut secara khusus membahas mengenai karakteristik dari negara – negara Nordik yang memiliki tujuan yang sama untuk menjadi Model Negara Sejahtera (*welfare state model*). Tulisan tersebut menjelaskan bagaimana konsep – konsep *welfare state* lalu membandingkan negara – negara Nordik dalam membentuk kebijakan kesetaraan dan berusaha untuk menjadi contoh negara sejahtera, serta menjelaskan tendensi pengaruh sosial politik dalam perspektif Eropa untuk mencari alasan terbentuknya Nordic Welfare State. Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian dalam skripsi ini karena melihat bagaimana konsep karakteristik *welfare state* akhirnya membentuk kebijakan – kebijakan di negara – negara Nordik, namun terdapat perbedaan bahwa penelitian pada skripsi ini secara khusus membahas mengenai kebijakan feminisme, dengan menggunakan teori feminisme liberal dan

teori identitas konstruktivisme untuk melihat karakteristik *welfare state* akhirnya membentuk kebijakan di negara Nordik.

Terdapat juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Douglass Brommesson dalam karyanya yang berjudul “*Nordicness in Swedish foreign policy – from mid power internationalism to small state balancing*”. Dalam tulisan tersebut mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan variasi nilai – nilai Nordik di Swedia dalam pembentukan kebijakan luar negerinya (Brommesson, 2018). Secara khusus bacaan tersebut menjelaskan bagaimana perjalanan Swedia untuk membentuk kebijakan luar negeri feminisme. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Swedia tertentu berdasarkan pada norma dan identitas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Douglass tersebut hanya menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan luar negerinya tanpa menggunakan analisis perspektif feminisme, identitas nilai – nilai Nordik juga belum dijelaskan secara lebih lanjut. Penelitian tersebut hanya memiliki fokus pada negara Swedia sebagai bagian dari negara Nordik.

Selain itu, penelitian terdahulu dengan judul penelitian “Perspektif Feminisme Terhadap Perubahan Kebijakan Swedia Terkait Krisis Pengungsi Periode 2014 – 2017” karya Putri Larasati yang membahas mengenai alasan Swedia mengubah kebijakan *Open Door*-nya menjadi kebijakan *U-Turn* terkait penanganan krisis pengungsi periode 2014 – 2017 yang dianalisis menggunakan perspektif feminisme (Larasati, 2018). Hasil dari penelitian tersebut bahwa perubahan kebijakan karena adanya dorongan publik dan adanya agenda evaluasi sistem keimigrasian Swedia dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan perspektif yang sama dalam melihat kebijakan yang dibuat oleh Swedia yaitu perspektif feminisme. Terdapat perbedaan, bahwa penelitian tersebut tidak membahas mengenai apakah terdapat faktor identitas Swedia sebagai negara Nordik dalam membuat kebijakan tersebut.

1.5.1 Teori Konstruktivisme Identitas dan Nilai

Teori dan konsep identitas merupakan salah satu dari tiga konsep yang terdapat dalam teori konstruktivisme. Tiga konsep konstruktivisme tersebut yaitu identitas, bahasa dan norma (Wendt, 1999). Alexander Wendt telah menjelaskan definisi identitas sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan (Wendt, 1999). Hal tersebut memiliki arti bahwa identitas dapat membentuk suatu aktor dalam membuat tindakan secara tidak langsung. Alexander Wendt telah membagi menjadi empat jenis identitas (Wendt, 1992). Pertama, identitas yang terbentuk secara personal suatu aktor yang secara alami seperti nasionalisme, lambang negara dan lain - lain. Kedua, identitas yang dipengaruhi oleh kategori tertentu dapat seperti suatu kepercayaan atau agama dan ideologi politik. Ketiga, identitas ini terbentuk apabila aktor bersangkutan atau melakukan aktivitas dengan aktor lain, dalam identitas ini aktor dipengaruhi oleh faktor internal yaitu unsur negara, opini publik dan faktor eksternal yaitu nilai dan norma internasional, tanggapan dari aktor lain (Holsti, 1970). Keempat, identitas kelompok atau *collective identity* dimana berisi kumpulan aktor negara yang saling berhubungan dan membentuk identitas secara bersamaan.

Melihat pembentukan identitas kolektif tersebut terdapat tiga faktor dalam menjelaskannya (Wendt, 1994). Faktor pertama, adalah faktor interaksi antar negara. Faktor kedua, adalah faktor intersubjektivitas antarnegara yang kemudian dua atau lebih negara mengidentifikasi satu sama lain sebagai teman. Faktor ketiga, adalah faktor komunikasi antarnegara.

Terdapat kesulitan untuk melihat perbedaan antara identitas nasional dengan identitas negara (Berger, 1996). Identitas nasional dapat dikatakan bahwa hal yang mengikat suatu komunitas untuk menghubungkan komunitas yang lainnya, sedangkan identitas negara dipahami sebagai keyakinan bersama tentang diri. Dalam pandangan Alexander Wendt, identitas tersebut membangun kepentingan negara yang pada akhirnya memandu perilaku negara. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perilaku negara, maka perlu untuk mengidentifikasi identitas yang bertanggung jawab atas kepentingan yang memandu tindakan negara. Identitas negara sendiri memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi internal dimana identitas negara mengacu pada representasi dan keyakinan yang dianut oleh elit dan masyarakat umum yang terdapat dalam negara itu. Kedua, dimensi eksternal dimana identitas negara sebagai representasi keyakinan tentang negara itu diantara para elit dan publik di negara lain.

Alexander Wendt telah membagi empat jenis identitas dalam hubungan internasional (Wendt, 1992). Identitas pertama adalah identitas personal dimana identitas suatu aktor terbentuk secara alamiah seperti contohnya bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme dan lain-lain. Identitas kedua

adalah identitas tipe yang dipengaruhi oleh kategori tertentu seperti ideologi politik atau agama. Identitas ketiga adalah identitas peran yang memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam hubungan internasional. Identitas keempat adalah identitas kelompok atau *collective identity*.

1.5.2 Model Kebijakan Luar Negeri “*The Decision-making*” oleh Richard Snyder

Teori politik luar negeri yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder dalam model pembuatan keputusannya (*the decision-making model*) melihat bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor dari eksternal dan internal (Richard C. Snyder, 1954). Perspektif Richard Snyder berasumsi bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan - keputusan yang dibuat oleh unit- unit politik domestik yang pemimpin negara baik individu maupun kelompok bertindak sebagai aktor – aktor utama dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam perspektif ini memberikan penekanan utamanya dalam analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks. Dalam menjelaskan faktor – faktor pembuatan kebijakan luar negeri, maka menurut Richard Snyder sebagai berikut :

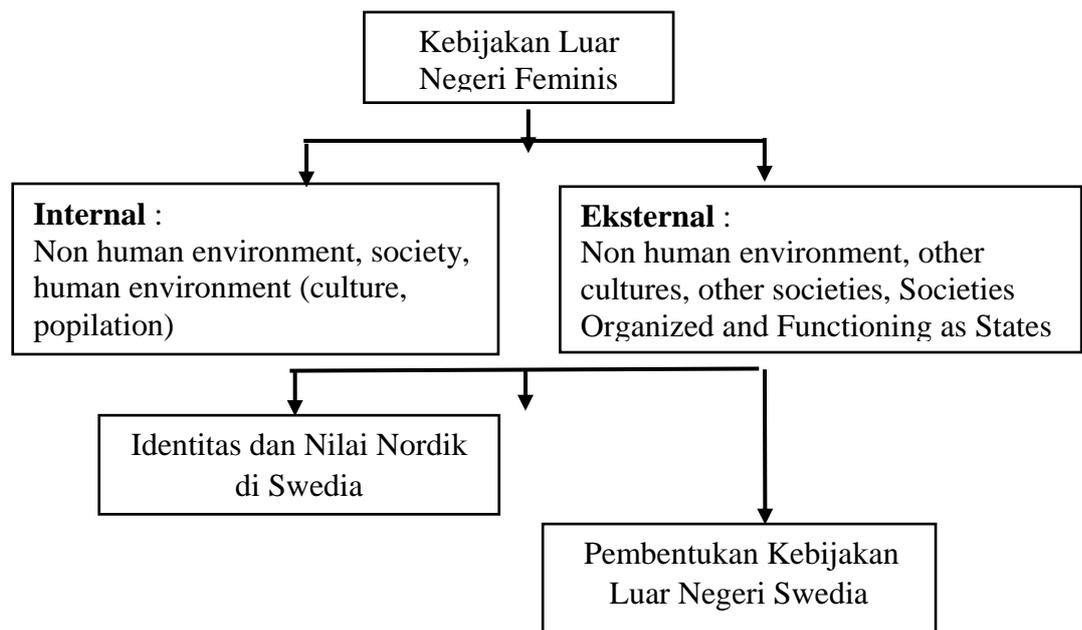
1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut)
2. Arus informasi diantara mereka
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri

4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional.

Model pembuat keputusan politik luar negeri sangatlah kompleks, dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan harus dipertimbangkan. Akan tetapi, dalam hal ini sangatlah besar pengaruhnya yang berasal dari faktor eksternal dan internal, dimana faktor eksternal berasal dari luar teritori wilayah suatu negara dan faktor internal berasal yang terjadi di dalam suatu negeri tersebut (Richard C. Snyder, 1954).

Oleh karena itu, model pembuat keputusan luar negeri yang telah dirumuskan Richard Snyder dapat digunakan penulis untuk menganalisis kebijakan luar negeri feminis di Swedia dimana fokus utama pada faktor internal akan melihat nilai dan identitas yang membentuk Swedia. Dalam mempermudah pembaca, penulis akan memberikan ilustrasi skema alur penelitian berikut :

Bagan 2. Skema Alur Pemikiran
Bagan Skema Identitas dan Nilai dalam Kebijakan Luar Negeri Swedia



1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu batasan konsep yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

1.6.1.1 Identitas Bangsa

Identitas bangsa atau identitas nasional merupakan suatu bentuk penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat menjadi pembeda dengan ciri khas bangsa lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*identity*” yang memiliki arti ciri, tanda, atau jati diri. Sedangkan nasional berasal dari kata “*nation*” yang memiliki arti bangsa. Secara sosiologis antropologis kata bangsa memiliki arti persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dimana anggota dari persekutuan tersebut merasa satu kesatuan, ras, bahasa, kebudayaan, keyakinan dan lain – lain (Winarno, 2011).

1.6.1.2 *Welfare State*

Konsep negara sejahtera dapat dikatakan sebagai proses distribusi sumber daya yang ada dalam suatu negara kepada publik (Sukmana, 2016). Negara sejahtera dibagi atas tiga model yaitu : Model Liberal atau Residual (*Anglo-Saxon*), Model Konservatif, dan Model Sosial – Demokratis. Negara – negara Nordik sendiri menggunakan Model Sosial – Demokratis. Model Sosial – Demokratis memiliki ciri – ciri yaitu 1) satu skema pajak dipakai untuk membiayai seluruh skema kesejahteraan, 2) mencakup layanan yang

menyeluruh dengan standar yang tinggi dan akses yang sangat mudah, dan warga negara memiliki hak atas pengaturan atas kesejahteraan, 3) kebijakan negara diarahkan pada industri dan perdagangan untuk mencapai kesejahteraan itu.

1.6.1.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender atau kesetaraan antara perempuan dan laki – laki, dapat diartikan adanya kesamaan hak, tanggung jawab, perlakuan dan penilaian bagi laki – laki maupun perempuan baik dalam aspek pekerjaan maupun hubungan antar kerja dan kehidupan (Nelien Haspels, Busakorn Suriyasarn, 2005).

1.6.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri mengacu pada bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan aktor – aktor global lainnya. Adanya kebijakan luar negeri tidak lepas dari adanya kepentingan nasional (*national interest*). Kebijakan luar negeri menurut Rosenau merupakan upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau, et al., 1976). Bagi kaum liberal, adanya kebijakan luar negeri merupakan sebuah jembatan untuk berinteraksi maupun bekerja sama dengan negara lain atau dengan aktor lain dengan cara – cara diplomasi. Kebijakan luar negeri melibatkan pertimbangan, cara, metode, tujuan maupun kesepakatan penting karena tidak hanya mewakili kepentingan suatu kelompok tertentu. Aktor – aktor dalam

pembuatan kebijakan luar negeri seperti presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, maupun jajaran menteri lainnya.

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah operasionalisasi dari konsep yang telah dicantumkan pada subbab definisi konseptual.

1.6.2.1 Identitas Bangsa

Istilah identitas nasional atau bangsa melahirkan sebuah tindakan kelompok (*collective action*) diwujudkan dalam bentuk organisasi maupun pergerakan – pergerakan yang diberi atas dasar atribut – atribut nasional. Dalam penelitian ini melihat munculnya identitas nasional suatu bangsa dapat ditentukan oleh beberapa faktor sesuai dengan alat analisis teori konstruktivisme identitas sebagai berikut: 1) Faktor objektif yaitu faktor geografis – ekologis dan demografi, 2) Faktor subjektif yaitu faktor historis, politik, sosial dan kebudayaan.

1.6.2.2 Welfare State

Welfare State atau negara kesejahteraan dalam penelitian ini diartikan sebagai negara di mana kekuasaan sebuah negara memiliki fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yaitu dalam aspek kesetaraan gender dan tingkat sosial. Pertama, dengan menjamin individu dan keluarga dengan memberikan pendapatan atau upah minimum. Kedua, mempersempit tingkat ketidakamanan dengan memungkinkan individu atau masyarakat untuk menghindari krisis (pengangguran, penyakit,

ketidaksetaraan). Ketiga, memastikan semua warga negara atau masyarakat tanpa adanya perbedaan kelas atau status dalam melakukan layanan sosial.

1.6.2.3 Kesetaraan Gender

Adanya kesetaraan gender maka semua orang dari segala tingkat umur dan juga jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa semua manusia di muka bumi ini memiliki hak atas akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dan memiliki manfaat yang serta (adil) sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

1.6.2.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dalam penelitian memiliki definisi aktivitas dan sikap suatu negara dalam melakukan komitmen – komitmen untuk ikut aktif dalam menyelesaikan masalah – masalah internasional. Dalam penelitian akan berfokus pada penelitian yang memiliki fokus pada nilai – nilai feminisme. Nilai – nilai feminisme yang berfokus pada kesetaraan gender menjadi poin awal suatu negara untuk meringkai masalah – masalah internasional dan memberikan penyelesaian menggunakan nilai – nilai feminisme.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan faktor identitas Nordik dalam pembentukan kebijakan luar negeri feminisme di Swedia, maka penulis memberikan argumen bahwa adanya karakter

identitas menjadi faktor yang menunjang pembentukan karakteristik Swedia sebagai negara *welfare state*. Adanya konsep *welfare state* juga telah mencerminkan bahwa negara sejahtera memiliki poin fokus pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Swedia untuk terus berfokus pada kesejahteraan masyarakat global yang dibuktikan pembentukan kebijakan luar negeri feminis oleh pemerintahan Swedia.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif atau *descriptive research* adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena terjadi baik pada saat ini maupun pada masa lampau. Furchan telah membagi karakteristik dalam penelitian deskriptif yaitu 1) penelitian deskriptif cenderung pengamatan yang menggambarkan fenomena apa adanya dengan menelaah secara teratur, ketat, cermat dan objektif, 2) tidak terdapat perlakuan yang diberikan atau dikendalikan (Sukmadinata, 2008).

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif adalah metodologi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan pada manusia sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya (Rahmat, 2009). Dengan penelitian kualitatif ini penulis berangkat dari data – data yang

tersedia dan memanfaatkan teori sebagai bahan untuk penjas dalam penelitian tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Dijelaskan bahwa, situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti atau penulis mengamati keadaan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi maupun data – data yang diperlukan dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2007). Terkait dengan penelitian tersebut, maka penulis menetapkan bahwa situs penelitiannya di Indonesia yang lebih tepatnya penulis berada di Kota Semarang sebagai tempat untuk meneliti skripsi ini.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek yang dijadikan sebagai sampel atau objek yang diteliti adalah negara Swedia. Dalam penelitian ini secara khusus melihat kebijakan feminisme di negara Swedia terutama pada kebijakan luar negeri feminisnya yang tertuang dalam The Swedish Foreign Policy Service Action Plan for Feminis Foreign Policy 2019-2022. Penelitian ini juga menggunakan subjek identitas nilai nordik untuk melihat faktor negara Swedia dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Identitas nilai – nilai Nordik yang berfokus pada nilai – nilai universal pada hak asasi manusia terutama pada kesetaraan gender. Identitas nilai Nordik dilihat melalui konsep *welfare state* merupakan suatu konsep dimana pemerintahan yang melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk setiap warga negara di dalamnya.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian kualitatif dalam skripsi ini, data penulis akan berbentuk kata – kata atau teks secara tertulis seperti koran baik cetak maupun elektronik, buku-buku, dan artikel-artikel jurnal ilmiah. Data secara tertulis tersebut akan menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan baik fenomena saat ini maupaun masa lampau.

1.8.5 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Dalam data yang sekunder maka data diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (Sugiyono, 2007). Data sekunder ini dapat berupa buku – buku, catatan, bukti – bukti, arsip, dokumen, laporan historis yang telah tersusun yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka. Penulis mengumpulkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Tulisan-tulisan tersebut bersumber dari koran baik cetak maupun elektronik, buku-buku, dan artikel-artikel jurnal ilmiah. Untuk memperolehnya penulis menggunakan jurnal – jurnal yang tersedia baik jurnal universitas seperti E – Journal Undip, Journal UI, Jurnal UGM dll lalu menggunakan jurnal – jurnal internasional seperti Research Gate, Cambridge Journal, Akademia.edu, Journal Storage (JSTOR) dll. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan situs resmi negara – negara Nordik dan situs – situs berita seperti

Kompas.com, BBC.com untuk melihat perkembangan kebijakan feminisme dan fenomena - fenomena di negara Nordik.

1.8.7 Analisis Data dan Interpretasi Data

Dalam analisis data kualitatif, metode analisis data yang mendalam dari hasil pengamatan, studi literatur, dan wawancara bertujuan untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan data, hipotesa dan lain – lain agar dapat ditarik kesimpulan secara tentatif (Rahmat, 2009). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kongruen. Dalam teknik analisis kongruen maka harus terdapat kesesuaian antar teori yang relevan dengan konsep yang akan diteliti. Dengan menggunakan proses pelacakan dalam teknik analisis kongruen akan membantu melacak peristiwa untuk menggali hubungan kausal ke hasil yang merata. Proses teknik analisis kongruen ini juga menggunakan kekuatan penjelas dari berbagai tinjauan teoritis. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori konstruktivisme identitas untuk meneliti identitas nilai – nilai Nordik di dalam negara Swedia. Penulis akan melacak sejarah identitas nilai Nordik yang diambil oleh Swedia yang menjadi faktor penentu Swedia dalam mengambil kebijakan luar negeri feminisnya.

1.8.8 Kualitas Data

Menguji kualitas data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut benar – benar merupakan penelitian ilmiah selain itu juga untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2007). Penulis dalam mengumpulkan data dalam bentuk kajian teoritis dan artikel – artikel jurnal ilmiah

menggunakan jurnal dan artikel yang berasal dari jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi SCOPUS dan dikti SINTA seperti jurnal universitas yaitu E – Journal Undip, Journal UI, Jurnal UGM dll lalu menggunakan jurnal – jurnal internasional seperti Research Gate, Cambridge Journal, Akademia.edu, Journal Storage (JSTOR) . Hal tersebut untuk memastikan bahwa sumber – sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber akurat dan terpercaya karena telah melewati hasil review melalui para ahli.

1.8.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan, berisi mengenai kerangka riset atau penelitian yang dilakukan. Pada bab 2 akan diuraikan mengenai deskripsi kasus. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai perkembangan dinamika munculnya feminisme di Swedia. Penulis juga akan membahas kebijakan luar negeri feminis Swedia dan sejarah terbentuknya identitas Nordik

Bab 3 akan membahas mengenai analisis mengenai pembentukan kebijakna luar negeri feminis di Swedia yang dipengaruhi oleh identitas Nordik. Dalam melakukan analisis, peneliti akan menggunakan konsep-konsep yang telah diuraikan pada bagian kerangka pemikiran, yang diperkuat dengan data-data terkait. Sedangkan pada bab 4, merupakan bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran terhadap penelitian lebih lanjut. Dalam bab ini akan disampaikan mengenai temuan penelitian.